

CAKRAWALA PENDIDIKAN

**FORUM KOMUNIKASI ILMIAH
DAN EKSPRESI KREATIF
ILMU PENDIDIKAN**

Mengembangkan Pola Pikir Berwirausaha

**Membangun SMK Yang Unggul
Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Lulusan
Untuk Menghadapi Persaingan Kerja
Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

**Makna Simbol Dalam Komunitas Public United Not Kingdom (PUNK)
Nikita Jibril**

Merajut Nasionalisme Ditengah Ancaman Disintegrasi Bangsa

**The Strength Of Natural Reader In The Teaching Of English
For Young Learners**

**Teachers' Speech Act And Politeness In EFL
Classroom Interaction**

The Power Of Classroom Interaction In EFL Classes

Code-Mixing And Code-Switching In Various Indonesian Texts

**Analisis Kesalahan Mahasiswa STKIP PGRI Blitar
Dalam Menyelesaikan Soal Persamaan Deferensial Orde 1
Yang Berkaitan Dengan Persamaan Deferensial
Bernoulli Dan Homogen**

**The Effectiveness Of Counselling Learning Approach
And Scrabble Game In The Teaching Of Vocabulary**

**Implementasi KWH (*Know, Want, How*)
Untuk Mengarahkan Pemahaman Proses Berpikir Mahasiswa
Pada Materi Sifat-sifat Keterbagian**

**The Effectiveness Sculpture Method In Teaching Writing
For English Department Students**

**Improving The Quality Of Teaching Learning Process
Of Writing Class Through Lesson Study**

**The Effect Of Repeated Reading Strategy On Reading Fluency :
The Case Of Students With Reading Difficulties**

Pemahaman Mahasiswa Berdasarkan Taksonomi Bloom

ISSN 1410-9883

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting
Kadeni

Wakil Ketua Penyunting
Saiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana
R. Hendro Prasetianto
Udin Erawanto
Riki Suliana
Ekbal Santoso

Penyunting Ahli
Miranu Triantoro
Masruri
Karyati
Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha
Yunus
Nandir
Sunardi

Alamat Penerbit/ Redaksi : STKIP PGRI Blitar, Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493. Langganan 2 nomor setahun Rp. 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua :** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua :** M. Khafid Irsyadi, ST, M.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik spasi rangkap pada kertas quarto, panjang 10-20 halaman, dan diserahkan paling lambat 3 bulan sebelum penerbitan, dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan pada disket komputer IBM PC atau Kompatibel. Berkas naskah pada disket komputer diketik dengan menggunakan pengolah kata *Microsoft Word*.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
3. Semua karangan ditulis dalam bentuk *esai*, disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut :

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Artikel konseptual meliputi; (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak (50-75 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/ pembahasan (terbagi atas sub-sub judul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, b) nama-nama peneliti, (c) abstrak, (d) kata kunci, (e) identitas peneliti (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan, (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
5. Daftar rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Barkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Loka Karya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIPMALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto. 1998. *Pengaruh Penginformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: representing Representation. Dalam P.J. Nlack & A. Lucas (Eds.). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses 21 April 2006.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. 1(1):45-52.

6. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Depdikbud, 1987).

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan
 Volume 20, Nomor 1, April 2017

Daftar Isi

Mengembangkan Pola Pikir Berwirausaha	1
<i>Kadeni</i>	
Membangun SMK Yang Unggul Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Lulusan Untuk Menghadapi Persaingan Kerja Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	8
<i>Ekbal Santoso</i>	
Makna Simbol Dalam Komunitas Public United Not Kingdom (PUNK) Nikita Jibril	16
<i>Udin Erawanto</i>	
Merajut Nasionalisme Ditengah Ancaman Disintegrasi Bangsa	24
<i>Miranu Triantoro</i>	
The Strength Of Natural Reader In The Teaching Of English For Young Learners	32
<i>Saiful Rifa'i</i>	
Teachers' Speech Act And Politeness In EFL Classroom Interaction	41
<i>Sulistiyani</i>	
The Power Of Classroom Interaction In EFL Classes	50
<i>Diani Nurhajati</i>	
Code-Mixing And Code-Switching In Various Indonesian Texts	61
<i>Rainerius Hendro Prasetianto</i>	
Analisis Kesalahan Mahasiswa STKIP PGRI Blitar Dalam Menyelesaikan Soal Persamaan Persamaan Deferensial Orde 1 Yang Berkaitan Dengan Persamaan Deferensial Bernoulli Dan Homogen	68
<i>Ayu Silvi Lisvian Sari</i>	
The Effectiveness Of Counselling Learning Approach And Scrabble Game In The Teaching Of Vocabulary	78
<i>Varia Virdania Virdaus</i>	
Implementasi KWH (<i>Know, Want, How</i>) Untuk Mengarahkan Pemahaman Proses Berpikir Mahasiswa Pada Materi Sifat-sifat Keterbagian	89
<i>Cicik Pramesti, Riki Suliana, Suryanti</i>	
The Effectiveness Sculpture Method In Teaching Writing For English Department Students	98
<i>Herlina Rahmawati</i>	
Improving The Quality Of Teaching Learning Process Of Writing Class Through Lesson Study	106
<i>Lina Mariana, Diani Nurhajati</i>	
The Effect Of Repeated Reading Strategy On Reading Fluency: The Case Of Students With Reading Difficulties	116
<i>Imam Suhaimi</i>	
Pemahaman Mahasiswa Berdasarkan Taksonomi Bloom	126
<i>Zemmy Indra Kumala Dewi</i>	

MERAJUT NASIONALISME DITENGAH ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

Miranu Triantoro
mir.stkip@gmail.com
STKIP PGRI BLITAR

Abstrak : Nasionalisme merupakan sebuah faham dan sikap kecintaan terhadap bangsa dan negara dengan segala karakteristiknya. Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam keanekaragaman suku, agama, budaya, adat istiadat, harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur dengan secara bijak sebagai sebuah kekuatan. Secara historis kekuatan akan sikap nasionalisme itu telah mampu membangkitkan bangsa dari keterpurukan akibat penjajahan. Oleh karena itu menghadapi fenomena merosotnya sikap nasionalisme akhir-akhir ini yang ditandai dengan perseteruan antar golongan, suku, agama, sikap politik yang tidak simpatik yang akan mengancam integrasi bangsa, maka semua pihak harus segera menyadari dan melakukan refleksi diri secara vertikal maupun horizontal untuk membangun kebersamaan dalam mencapai tujuan dan cita-cita masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Nasionalisme, desintegrasi bangsa

Abstract : Nationalism is a philosophy and attitude of love to the nation and the country with all its characteristics. Indonesia as a unitary state consisting of various ethnic, religious, cultural, and customary diversities must have the ability to manage and control wisely as a great force. Historically the strength of the nationalist attitude has been able to raise the nation from the decline caused by colonialism. Therefore facing the phenomenon of the degradation of the attitude of nationalism recently which is marked by the feud between groups, tribes, religions, unsympathetic political attitude that will threaten the integration of the nation, then all parties must immediately realize and do self-reflection vertically or horizontally to build togetherness in achieving the goals and ideals of a just society prosperous based on Pancasila and the 1945 Constitution in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Key Words : Nationalism, disintegration of the nation

PENDAHULUAN

Secara historis faham nasionalisme mulai berkembang di Indonesia melalui para pemuda yang mengenyam pendidikan di luar dan/atau melalui para humanis Barat yang memperkenalkan pendidikan sebagai salah satu bagian dari “politik etis”, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berpikir lebih rasional mengenai kondisi bangsa dan negara yang telah mengalami penindasan

demi penindasan dari para imperialis yang telah menanamkan kuku kekuasaannya di bumi persada Indonesia.

Kesadaran akan kondisi bangsa yang terpuruk akibat penjajahan telah menyadarkan para pemuda untuk bangkit dan memelopori pergerakan-pergerakan yang tidak hanya sekedar bersifat kedaerahan dan bersifat fisik akan tetapi lebih bersifat nasional dan juga non fisik. Perjuangan para

pemuda ini ditandai dengan berdirinya sebuah perkumpulan “Budi Utomo” pada tanggal 20 Mei 1908, yang selanjutnya dijadikan sebagai tonggak sejarah yang hingga kini dikenal dengan sebutan “Kebangkitan Nasional”

Secara realistis, sebenarnya Organisasi Budi Utomo, awalnya tidak lebih dari sebuah perkumpulan yang bersifat lokal dan ke-daerahan, karena didirikan di Jawa oleh para pemuda yang sedang belajar di Batavia. Namun demikian dampak yang ditimbulkan dengan berdirinya “Budi Utomo” tersebut sangat luar biasa, sehingga menjadi pendorong untuk bangkitnya berbagai organisasi-organisasi pemuda di berbagai belahan dan daerah di Indonesia. Misanya saja kita bisa melihat fakta berdirinya berbagai organisasi pemuda seperti Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Timorees Ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia), Pemuda Indonesia, Jong Islamienten Bond, kependuan, dan sebagainya. Disamping organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial hingga yang secara terang-terangan bergerak dalam bidang politik, seperti Sarikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia.

Puncak dari pergerakan dan perjuangan para pemuda tersebut mengkristal di dalam sebuah agenda sejarah “Sumpah Pemuda” pada tanggal 28 Oktober 1928 yang telah mengumandangkan Ikrar/Sumpah bersama untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu yaitu Indonesia, yang menurut Soetandyo Wignyosubroto (2010, 8) merupakan pengakuan yang melahirkan suatu realitas baru di ranah alam kesadaran manusia yang subjektif, untuk kemudian

mengembang – atau harus dikembangkan -- menjadi suatu solidaritas sosial yang intersubjektif, terobjektivisasi dalam pola perilaku warga masyarakat yang nyata dari hari ke hari. Hal ini sekaligus menandakan bahwa sejak saat itu telah terkristal dalam diri para pemuda untuk memiliki dan mengembangkan solidaritas kebangsaan diantara berbagai perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, adat istiadat, antar golongan dan lain-lain. Kesadaran sosial dan solidaritas yang telah ditunjukkan oleh para pemuda inilah yang dalam perkembangan selanjutnya mampu membawa bangsa Indonesia menuju jembatan emas kemerdekaan.

Nilai luhur dan karakter yang telah mampu mengangkat citra bangsa dari keterpurukan akibat penjajahan tersebut akhir-akhir ini diuji dengan berbagai kasus desintegrasi bangsa yang sangat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian berbagai pihak dan kalangan, bahkan luar negeri adalah “Kasus Penistaan Agama” yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama (Ahok). Hal ini ditandai dengan berbagai demo besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai organisasi agama (Islam) yang menuntut untuk ditegakkannya hukum untuk Ahok sebagai “Penista Agama” di Pusat Pemerintahan, bahkan di wilayah-wilayah/daerah-daerah secara sporadis. Kasus inipun semakin rumit karena tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik yang terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yakni Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang salah satu Calon Gubernurnya adalah Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

Secara riil kita bisa melihat berbagai berita di mas media, baik cetak maupun online, bahwa masing-masing pihak berusaha untuk saling menjatuhkan dan

memanfaatkan kesempatan untuk meraih simpati dengan berbagai cara yang secara prosedural hukum sebenarnya tidak diijinkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, misalnya melalui issue-isue SARA dan black campaign, sebuah kampanye yang tidak berbasis data dan hanya berdasar kepada kebencian yang tidak memiliki dasar dan fakta sama sekali.

Fakta sebagaimana tersebut di atas jika tidak dicermati dan diselesaikan secara bijak, akan menjadi titik awal yang merusak sendi-sendi nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara, yang akhirnya bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang bersifat pluralistis.

NASIONALISME

Nasionalisme pada dasarnya merupakan sebuah sikap dan faham yang dimiliki oleh warga bangsa untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang ada dalam sebuah wadah negara yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini sekaligus menjadi sebuah gambaran yang secara historis menjadi awal kebangkitan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan menghadapi para imperialis yang telah menancapkan kuku kekuasaannya hingga bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, penderitaan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Ikatan nasionalisme yang tumbuh pada saat itu didasarkan atas kepentingan yang sama untuk memerdekakan diri dan menjadi negara yang memiliki kebebasan untuk mengatur wilayahnya menuju kejayaan dan masyarakat yang diidam-idamkan, terlepas dari karakteristik dan latar belakang sosio budaya yang berbeda-beda.

Konsep tersebut di atas memberikan gambaran bahwa nasionalisme suatu bangsa tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Demi-

kian juga dengan Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralisme, dan terdiri dari berbagai keanekaragaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat maupun agama sudah barang tentu tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya. Oleh karena itulah semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi pegangan dalam menjalin hubungan dan mempererat rasa persatuan sekaligus membangun bangsa menuju cita-citanya, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Ahmad Farhan Hamid (2010, 10) sebagai berikut:

“Bhinneka Tunggal Ika adalah alat perekat bagi seluruh bangsa dalam dimensi etnis dan kewilayahan yang demikian beragam dan luas yang terbentang dalam wilayah kepulauan Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi landasan untuk bersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya”

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, maka Soetandyo Wignjosebroto (2010,9) mengemukakan perlunya perenungan dan pengkajian ulang mengenai konsep *Bhinneka Tunggal Ika* yang selama ini difahami, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

Pengakuan bahwa kehidupan di negeri ini adalah kehidupan yang *Bhinneka Tunggal Ika* sudah waktunya direnungkan dan dikaji ulang, tidaklah harus lagi diartikan 'sekalipun berbeda-beda tetapi sesungguhnya satulah itu' melainkan dipahami dalam isyaratnya yang baru. Ialah, bahwa 'sekalipun satu namun sesungguhnya berbeda-beda' itu

Selanjutnya beliau mengemukakan, bahwa Nasionalisme pada intinya merupakan Kesadaran Bernegara Bangsa dan Kesadaran Berkesamaan Budaya sebagai Dasar Legitimasi Terbentuknya Negara Bangsa. Hal ini tercermin dari kata-kata yang tercermin dalam kalimat berikut:

Nasionalisme adalah suatu paham politik yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa itu -- demi ketahanan hidup dan kejayaannya -- seharusnya bersatu bulat ke dalam suatu komunitas politik yang diorganisasi secara rasional ke dalam suatu kehidupan bernegara. Dari nasionalisme inilah lahirnya ide dan usaha perjuangan politik untuk merealisasi terwujudnya suatu negara bangsa

Berpijak dari konsepsi di atas, maka sikap nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara dalam suatu negara akan mempengaruhi sikap kecintaan, kemauan, dan kebanggaannya terhadap negara, sehingga akan melakukan tindakan-tindakan yang positif dalam berjuang demi tetap tegak dan utuhnya serta tercapainya tujuan kesejahteraan seluruh warga yang ada dalam suatu negara.

DES INTEGRASI BANGSA

Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa di banding dengan negara-negara lain di dunia ini baik jika ditinjau dari jumlah pulau-pulau, suku bangsa, adat istiadat/budaya, agama, bahasa maupun sumber daya yang ada. Badan Pusat statistik telah merilis dalam hasil surveynya di tahun 2015 Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010, dimana Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah men-

capai 41% dari total populasi (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia. diakses 23 Maret 2017), Terdapat 1211 bahasa (1158 bahasa daerah) yang diberi kode oleh BPS tahun 2010. Memiliki 6 Agama yang secara resmi diakui oleh negara dan beberapa aliran kepercayaan. Keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia dapat menjadi daya tarik dan modal dasar dalam memajukan pembangunan bangsa jikalau mampu dikelola dengan baik, Namun demikian secara faktual juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik diantara beberapa perbedaan akibat keanekaragaman yang ada.

Secara historis kita bisa mengambil pelajaran dari kemunculan reformasi yang dimotori oleh gerakan besar-besaran para Mahasiswa dan jatuhnya kekuasaan Orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Kemampuan untuk mempersatukan beberapa golongan dan kepentingan masyarakat dapat dikelola dengan baik untuk mengubah sebuah tatanan baru yang terlepas dari pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan dan hukum, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah membawa bangsa ke dalam keterpurukan, khususnya dalam berbagai praktek demokrasi. Namun demikian disisi yang lain kita juga bisa melihat berbagai fakta yang ada, di mana reformasi yang didengung-dengungkan untuk mengubah tatanan yang ada masih belum mampu mengubah fenomena yang ada dengan baik, dan bahkan banyak kita ketemukan berbagai fenomena yang sangat membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan sekaligus persatuan dan kesatuan yang berbhineka, dengan munculnya euforia politik yang keablasan.

Dalam bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, banyak terjadi bentrokan-bentrokan antar suku, bahkan antar masyarakat dan pelajar, yang menjadi gambaran dari ketiadaan kesantunan antar mereka. Kehidupan

beragama tidak mampu mempersatukan berbagai umat justru menjadi pemicu terjadinya konflik berkepanjangan, seperti kasus ambon, sampit dan lain-lain. Praktek-praktek politik juga tidak menunjukkan etika politik yang santun dan baik, justru menunjukkan etika politik yang “kotor”, upaya untuk mengadu domba antar kelompok, permainan politik uang/money politic, kampanye hitam/black campaign, hingga merajalelanya korupsi, kolusi yang dilakukan oleh pemain-pemain baru dalam kancah kehidupan politik.

Menurut Ketetapan MPR No VI/MPR.2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, berbagai konflik berkepanjangan yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern bangsa. Diantara faktor intern yang dimaksud adalah (1) masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama, (2) sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan; (3) tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa; (4) terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika; (5) kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; (6) tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah-tengah

masyarakat; (7) adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar; (8) meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah (1) pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antar bangsa yang semakin tajam; (2) makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Berbagai faktor dan fenomena tersebut di atas itulah yang sebenarnya perlu dicermati bersama oleh segenap bangsa Indonesia, sehingga diharapkan mampu secara benar dalam mengendalikan dan mengatasi terjadinya desintegrasi bangsa yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang bermuara kepada kehancuran kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sebenarnya desintegrasi bangsa itu adalah sebuah proses yang diawali dari ketidakbersatunya berbagai unsur yang ada dan dimiliki oleh suatu bangsa yang bersangkutan dalam mencapai tujuan mulia yang telah ditetapkan dalam landasan konstitusionalnya.

MERAJUT NASIONALISME DITENGAH DESINTEGRASI BANGSA

Hampir tiga dasa warsa (1989 s.d 2017) perjalanan panjang era reformasi yang diawali dari BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gur Dur); Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini Joko Widodo, keinginan masyarakat banyak untuk menikmati tatanan kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan masih merupakan barang yang langka. Tatanan-tatanan kehidupan baru yang disusun, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan bahkan pendidikan belum mampu mengangkat citra dan kebanggaan suatu bangsa.

Fenomena dan kondisi bangsa Indonesia secara faktual belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan, dan bahkan justru semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan. Tokoh-tokoh politik “baru” yang diharapkan mampu mengendalikan kondisi bangsa tidak dan belum mampu menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara baik dan benar berlandaskan konstitusional yang ada. Secara umum mereka masih mementingkan kepentingan pribadi dan partainya, bahkan muncul kelompok baru yang menjalankan praktek-praktek pemerintahan yang tidak baik. Mereka tidak berusaha mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa, akan tetapi justru memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan keuntungan daripadanya dengan melakukan praktek-praktek korupsi secara bersama. Kita bisa melihat dari berbagai media betapa banyak para pejabat yang terkena kasus korupsi secara bersama dalam sebuah kasus yang merugikan negara sangat luar biasa. Misalnya kasus mega proyek Hambalang atau wisma Atlet hingga kasus yang terbaru yang melibatkan banyak pejabat negara yakni kasus proyek E-KTP.

Berbagai kasus di atas relevan dengan sindiran yang disampaikan oleh A. Bakir Ihsan (2010, 21) berikut ini”:

Di tengah euforia kebebasan, kepentingan sempit sangat mungkin dirayakan. Atas nama kebebasan setiap kepentingan mendapat tempat aktualisasi tanpa peduli hak asasi orang lain. Aturan main diabaikan untuk mencapai puncak kekuasaan yang mereka fahami sebagai realitas yang inheren dalam politik, karenanya standar etika perlu ditegakkan melalui barometer yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan praksis”

Di sisi yang lain konflik vertikal dan horizontal yang berbau Suku, Agama, Ras, Antar Golongan semakin merebak diberbagai wilayah, bahkan sebuah kasus “penistaan Agama” yang dilakukan di Ibu-kota Negara mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan “demo damai” untuk mendukung diterapkannya keadilan dalam bidang hukum terhadap seseorang 'yang dianggap bersalah”. Hal ini tidak menutup kemungkinan setelah ditetapkan dan dijatuhkannya sebuah “Hukuman” terhadap seseorang yang dianggap bersalah akan muncul kembali perseteruan diantara pendukung dari masing-masing pihak untuk juga diperlakukan adil. Sehingga jikalau kasus-kasus yang muncul di masyarakat tidak segera diselesaikan secara bijak maka bangsa kita hanya berhenti dan berkuat pada permasalahan-permasalahan yang kecil, tidak memiliki kesempatan untuk melihat tugas dan tanggungjawab yang besar dalam membawa bangsa ini ke arah kemajuan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.

Dengan memperhatikan fenomena yang berkembang, dimana bangsa kita disibukkan dengan berbagai konflik sosial yang ada, maka perlu dilakukan dengan segera “Gerakan Kebangsaan” bersama yang dilakukan oleh segenap elemen bangsa, baik pejabat negara/pemerintah maupun rakyat sebagai subyek dari pembangunan bangsa itu sendiri.

Sehubungan dengan munculnya berbagai konflik kemasyarakatan yang membahayakan perikehidupan bersama tersebut bisa muncul dari seorang pejabat pemerintahan dan/atau masyarakat secara luas, maka untuk merajut benang merah rasa nasionalisme bangsa dapat dilakukan melalui dimensi vertikal dan dimensi horizontal.

Dalam dimensi vertikal, upaya untuk merajut nasionalisme dalam sebuah tataran konflik yang membahayakan keutuhan dan kesatuan negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah (1) Pemerintah harus mampu melaksanakan kebijakan secara merata dan konsisten dalam lapangan sosial budaya dan ekonomi antar golongan yang ada di masyarakat, artinya tidak ada sebuah golongan tertentu yang mendapatkan lebih banyak dan golongan yang lain terlalu sedikit, bahkan tidak mendapatkannya; (2) Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan profesional aparaturnya pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang berbau Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA); (3) Pemerintah secara intens melakukan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, bahwa bangsa Indonesia tidak bisa meniadakan adanya kemajemukan, Dan justru kemajemukan itu merupakan unsur yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita kemakmuran bersama; (4) Pemerintah atau pejabat negara harus mampu menunjukkan karakter yang baik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa serta bersih dari korupsi yang merugikan negara (5) Membangun kemandirian bangsa, artinya tata kelola perekonomian dan pemerintahan harus berdasar pada karakteristik dan kemandirian bangsa, tidak mengandalkan pada investasi asing yang membuat bangsa kita hanya sekedar konsumtif, akan tetapi harus menjadi produsen di negaranya sendiri. Hal ini sekaligus akan mampu menjawab sindiran dari Amin Rais (2010, 2) yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang kehilangan kemandirian:

“ ... sebagai bangsa kita sudah kehilangan kemandirian, dan sampai batas yang cukup jauh, kita juga sudah kehilangan kedaulatan ekonomi.

Dalam banyak hal bangsa Indonesia tetap tergantung dan menggantungkan diri pada kekuatan asing”

Secara faktual, sebenarnya dengan memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, jikalau mampu dikelola dengan baik melalui kebijakan-kebijakan makro maupun mikro yang mandiri tanpa ikut campur kekuasaan asing, tidak menutup kemungkinan bangsa kita dalam waktu yang tidak lama, akan menjadi negara maju yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Disinilah pentingnya peranan semua elemen masyarakat yang ada tanpa terkecuali.

Sedangkan dalam tataran horizontal, lebih mengacu kepada masyarakat secara umum dimana perbedaan suku, agama, ras, antara golongan, kedudukan dan status ekonomi itu dirasakan dan dialami dalam masyarakat dimana berada. Ada beberapa langkah yang bisa dikembangkan dan dipergunakan untuk memecahkan/solusi desintegrasi bangsa dalam sebuah masyarakat, diantaranya adalah (1) Mengembangkan sikap dan karakter toleransi antar masyarakat yang berbeda agama/keyakinan, suku, bahasa, ada istiadat, golongan dan lain sebagainya (2) memiliki dan mengembangkan wawasan yang bersifat pluralisme dan humanisme, artinya setiap pola pikir, pola tindak harus diletakkan dalam kerangka persatuan dan kesatuan dalam sebuah keanekaragaman; (3) Memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja keras, saling kerjasama, tolong menolong dalam rangka mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama.

Berbagai solusi yang sudah tersajikan di atas, sebenarnya berpijak dari karakter-karakter luhur yang secara inherent telah tercermin dalam nilai-nilai luhur bangsa yang telah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila, yang sudah mulai luntur karena

berbagai faktor baik intern maupun ekstern. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali bangsa Indonesia harus melakukan gerakan bersama kembali untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar berpijak dan sebagai Pandangan Hidup yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

Nasionalisme yang terkoyak akibat ketidak mampuan dalam menjaga adanya keberanekaragaman dalam sebuah konsep persatuan akan menjadi pemicu terjadinya konflik berkepanjangan dan justru akan membahayakan persatuan dan tercapainya cita-cita dan tujuan mulia bangsa.

Keanekaragaman adalah sebuah keniscayaan yang perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan dalam sebuah masyarakat yang berbudaya, tidak untuk dipersoalkan tetapi untuk dimanfaatkan demi tercapainya tujuan mulia kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan kemampuan mempersatukan berbagai perbedaan yang ada dengan satu tujuan yang sama dan mulia, bangsa Indonesia berhasil bangkit dan melepaskan diri dari penderitaan dan penindasan bangsa lain sehingga menjadi bangsa yang bebas, merdeka menuju tatanan kehidupan yang mandiri menuju masyarakat adil dan makmur.

Namun demikian, pasang surut nasionalisme suatu bangsa merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindarkan oleh

bangsa manapun, oleh karena itu menghadapi kondisi desintegrasi bangsa, semua pihak (baik pemerintah maupun rakyat secara umum) harus segera melakukan introspeksi dan melakukan gerakan bersama untuk bangkit dari keterpurukan dengan melakukan tindakan-tindakan positif dan proaktif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menjadikan Pancasila benar-benar sebagai Pandangan Hidup Bangsa yang di implementasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Hamid, Ahmad Farhan, 2010, **Meneguhkan Pilar-pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**, Makalah disampaikan dalam rangka Sarasehan di Universitas Negeri Malang, pada tanggal 20 Juli 2010
- Ihsan, A. Bakir, 2010, **Etika dan Logika Berpolitik**, Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001, tahun 2001, tentang **Etika Kehidupan Berbangsa**
- Rais, Mohammad Amin, 2008, **Agenda Mendesak Bangsa, Slamatkan Indonesia**, PPSK Press, Yogyakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo 2010, **Paham Nasionalisme Baru Untuk Indonesia**, Makalah Disampaikan dalam Sarasehan Nasional "Meneguhkan Pilar-Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". (Pancasila, UUD 1945, NKRI, & Bhinneka Tunggal Ika). Di Hotel Santika Malang, Selasa – Rabu, 20-21 Juli 2010